

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Komite Madrasah

1. Peran dan Fungsi Komite Madrasah

Eksistensi lingkungan pendidikan dalam pendidikan Islam memiliki arti yang sangat erat. Keduanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang di cita-citakan. Makin majunya perkembangan masyarakat di isyaratkan makin besarnya tuntutan masyarakat terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi lembaga yang tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut maka tidak mustahil akan berdampak pada pengucilan lembaga atau dengan kata lain lembaga tersebut akan mati bersamaan dengan mudarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam tersebut.¹

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan sampai lembaga pendidika di era globalisasi dan desentralistik (otonomi daerah) menuntut team work yang solid antara pihak sekolah itu sendiri dengan pihak luar, baik instansi atasan maupun masyarakat. Melalui Manajemen Berbasis Sekolah, maka administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi kunci sukses. Dan ketika hubungan sekolah dengan masyarakat ini dapat berjalan harmonis dan dinamis dengan sifat pedagogis, sosiologis dan produktif, maka diharapkan tercapai tujuan utama yaitu terlaksananya proses pendidikan disekolah secara produktif, efektif, efisien dan berhasil sehingga menghasilkan output yang berkualitas secara intelektual, spiritual dan sosial.² Dalam era reformasi dan otonomi daerah masyarakat diharapkan lebih meningkatkan

¹ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep Strategi dan Aplikasi*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 39.

² <http://subliyanto.blogspot.com/2010/01/hubungan-antara-sekolah-dengan.html>. Diakses pada tanggal 22 April 2015.

partisipasinya dalam berbagai bidang, salah satu di antaranya adalah bidang pendidikan.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya, ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih banyak bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih belum banyak diberdayakan.

Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 54 dikemukakan:³

1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan;
2. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Secara lebih spesifik, pada Pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:⁴

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis.
3. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan

³ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 91-92.

⁴ *Ibid*, hlm. 92.

pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi saat ini membuka peluang masyarakat secara luas untuk dapat meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan pendidikan yang dapat di salurkan melalui Komite Sekolah.

Komite Sekolah/Madrasah merupakan nama baru dari Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Hal yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan, keanggotaannya serta pemilihan dan pembentukan kepengurusan. Komite sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Peran aktif komite sekolah diperlukan untuk memberi dukungan (*supporting agency*) dan memenuhi kebutuhan sekolah, pengambilan keputusan, pengawasan manajemen sekolah, mediator antara pemerintah dengan masyarakat dan lainnya secara transparan dan demokratis dengan etika yang kuat. Badan ini bukanlah sebagai institusi perpanjangan tangan dinas pendidikan untuk melaksanakan keinginan dinas pendidikan. Akan tetapi, badan ini merupakan suatu institusi yang mandiri bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dengan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakasa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.⁵

Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep komite sekolah sebagaimana dikemukakan di atas. Berdasarkan

⁵ Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*, Nimas Multima, Jakarta, 2004, hlm. 171.

keputusan Mendiknas No. 044/U/2000, keberadaan komite sekolah berperan sebagai berikut:⁶

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sedangkan fungsi Dewan Sekolah/Komite Sekolah menurut Kepmendiknas No.044/U/2002 adalah sebagai berikut:⁷

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a) Kebijakan dan program pendidikan
 - b) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS/RAPBM)
 - c) Kriteria kinerja satuan pendidikan
 - d) Kriteria tenaga kependidikan
 - e) Kriteria fasilitas pendidikan

⁶ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: ... Op. Cit*, hlm. 92-93.

⁷ Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88.

- f) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- 5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
- 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut:⁸

- 1) Komite Sekolah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
- 2) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya maka paradigma MBS mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.

Dalam era otonomi daerah ini, dimana sekolah memiliki otonomisasi dan ruang gerak yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan, melalui paradigma MBS sekolah-sekolah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengurus dan mengatur pelaksanaan

⁸ <http://www.min2tbalai.com/2012/11/tugas-pokok-dan-fungsi-komite-sekolah.html>. di akses pada tanggal 22 April 2015.

pendidikan pada masing-masing sekolah. Pelaksanaan pendidikan disekolah-sekolah dalam tempat yang berlainan dimungkinkan untuk menggunakan sistem dan pendekatan pembelajaran yang berlainan. Kepala sekolah diberikan keleluasaan untuk mengelola pendidikan dengan jalan mengadakan serta memanfaatkan sumber-sumber daya pendidikan sendiri-sendiri asalkan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pusat. Karena karakteristik setiap siswa juga berbeda-beda secara individual, begitu juga dengan karakter dari masing-masing guru yang tentunya juga berbeda.

Dengan kondisi seperti itu, Komite Sekolah/Madrasah akan dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran juga dalam memberikan masukan dan arahan kepada masing-masing guru yang terlibat didalamnya. Komite Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan fungsinya sebagai partner dari kepala sekolah dalam mengadakan sumber-sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan yang dapat memberikan fasilitasi dan arahan terhadap guru-guru serta pengembangan kompetensi dari masing-masing guru supaya pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan juga diterima oleh masyarakat.

Komite Sekolah (KS) merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan sebagai wadah yang representatif. Kemunculan Komite Sekolah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.⁹

Adanya sinergi antara Komite Sekolah/Madrasah dengan sekolah menyebabkan lahirnya tanggung jawab bersama antara sekolah dan

⁹ Ade Irawan, dkk., *Mendagangkan Sekolah*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2004, hlm. 42.

masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan didaerahnya. Tentunya Komite Sekolah/Madrasah harus bisa menjalankan fungsinya supaya antara guru dan masyarakat dapat bersosialisasi dengan baik dan tidak ada sesuatu yang menyebabkan hubungan antara masyarakat dan sekolah menjadi renggang.

Komite sekolah juga dapat memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan, baik intra-kurikuler maupun ekstra kurikuler, dan pelaksanaan manajemen sekolah yang meliputi sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan, serta memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).¹⁰

Dengan pemberdayaan Komite Sekolah/Madrasah secara optimal, termasuk dalam memberikan arahan dan masukan kepada guru-guru dan semua pihak yang terlibat maka tidak menutup kemungkinan hubungan antara guru dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Karena fungsi dari Komite Sekolah/Madrasah salah satunya adalah penyalur aspirasi masyarakat. Kalau antara guru dan masyarakat hubungannya tidak harmonis besar kemungkinan sekolah itu menjadi tidak maju dan berkembang.

Persoalan dilapangan selama ini, untuk sementara kehadiran Komite Sekolah/Madrasah hanyalah sebagai bagian formalitas semata, baik dari pihak orang tua, wali murid maupun masyarakat tidak mengetahui secara mendalam fungsi dan peran komite sekolah di setiap satuan pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa komite sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan belaka.

¹⁰ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Logos, Jakarta, 2001, hlm. 135.

Sesuai dengan perkembangan zaman maka peran Komite Sekolah/Madrasah sangat penting untuk kemajuan sekolah, selain sebagai badan penyalur dana dari masyarakat juga berperan memberikan arahan dalam proses pengembangan kompetensi guru serta masih banyak lagi.

Secara lebih rinci, Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (2004) melukiskan beberapa indikator dari peran komite sekolah sebagai berikut.¹¹

TABEL 2.1
PERAN, FUNGSI DAN INDIKATOR KINERJA KOMITE SEKOLAH

Peran Komite Sekolah	Fungsi Manajemen	Indikator Kinerja
Sebagai <i>Advisory Agency</i>	1. Perencanaan sekolah	❖ Identifikasi sumber daya pendidikan dalam masyarakat; ❖ Memberikan masukan RAPBS; ❖ Menyelenggarakan rapat RAPBS; ❖ Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS; ❖ Ikut mensahkan RAPBS bersama kepala sekolah.
	2. Pelaksanaan Program a. Kurikulum b. PBM c. Penilaian	❖ Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah; ❖ Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran kepada guru-guru.
	3. Pengadaan Sumber Daya Pendidikan (SDM, S/P,	❖ Identifikasi potensi sumber daya pendidikan dalam masyarakat; ❖ Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat

¹¹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: ... Op. Cit*, hlm. 96-99.

	Anggaran)	diperbantukan di sekolah; ❖ Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diadakan di sekolah; ❖ Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.
Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency)	1. Sumber daya	❖ Pemantauan terhadap kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah; ❖ Mobilisasi guru sukarelawan di sekolah; ❖ Mobilisasi tenaga kependidikan nonguru di sekolah; ❖ Memantau kondisi sarana/prasarana di sekolah.
	2. Sarana dan Prasarana	❖ Mobilisasi bantuan sarana/prasarana di sekolah; ❖ Koordinasi dukungan sarana/prasarana di sekolah; ❖ Evaluasi pelaksanaan dukungan.
	3. Anggaran	❖ Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah; ❖ Mobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah; ❖ Koordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah; ❖ Evaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.
Sebagai Badan Pengontrol	1. Kontrol terhadap perencanaan	❖ Pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan di sekolah; ❖ Penilaian terhadap kualitas kebijakan di

(Controllin g)	sekolah	sekolah; ❖ Pengawasan terhadap proses perencanaan sekolah; ❖ Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah; ❖ Pengawasan terhadap kualitas program sekolah.
	2. Kontrol terhadap pelaksanaan program sekolah	❖ Pengawasan terhadap organisasi sekolah; ❖ Pengawasan terhadap penjadwalan program sekolah; ❖ Pengawasan terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah; ❖ Pengawasan terhadap sumber daya pelaksanaan program sekolah; ❖ Pengawasan terhadap partisipasi sekolah terhadap program sekolah.
	3. Kontrol terhadap output pendidikan	❖ Penilaian terhadap hasil Ujian Nasional; ❖ Penilaian terhadap angka partisipasi sekolah; ❖ Penilaian terhadap angka mengulang sekolah; ❖ Penilaian terhadap angka bertahan di sekolah.
Mediator Agency	1. Perencanaan	❖ Menjadi penghubung antara KS dengan masyarakat, KS dengan dewan pendidikan, serta KS dengan sekolah; ❖ Identifikasi aspirasi pendidikan dalam masyarakat; ❖ Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah.

	2. Pelaksanaan Program	❖ Sosialisasi kebijakan dan program pendidikan sekolah terhadap masyarakat; ❖ Memfasilitasi berbagai masukan terhadap kebijakan program terhadap sekolah; ❖ Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program pendidikan; ❖ Mengomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan di sekolah.
	3. Sumber daya	❖ Identifikasi kondisi sumber daya di sekolah; ❖ Identifikasi sumber daya masyarakat; ❖ Mobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah; ❖ Koordinasi bantuan masyarakat.

Apabila Komite Sekolah/Madrasah sudah dapat melaksanakan keempat perannya tersebut secara baik, diasumsikan bahwa Komite Sekolah/Madrasah tersebut dapat memberikan dampak terhadap kinerja sistem pendidikan yang ada. Dengan kata lain, keberadaan dan peran Komite Sekolah/Madrasah perlu menyentuh berbagai indikator kinerja dalam kaitannya dengan keberhasilan sistem pendidikan persekolahan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Identifikasi komitmen penyelenggara pendidikan sebagai titik awal pelaksanaan fungsi Komite Sekolah/Madrasah sangat penting diketahui terlebih dahulu, secara bertahap sedikit demi sedikit menyadarkan berbagai pihak terkait membangun penyelenggaraan pendidikan yang baik secara teratur, kontinue, berkesinambungan, dan sistematis.

Dengan demikian, Komite Sekolah/Madrasah berhadapan dengan realitas adanya jalan yang panjang yang harus ditempuh secara bertahap. Kondisi demikian memerlukan komitmen dan dukungan fasilitasi yang konsisten dan berkesinambungan. Pihak-pihak terkait perlu mengukur dari waktu ke waktu dan ditindaklanjuti dengan proses yang serasi pada kondisi lokalnya, seperti apa yang sudah berhasil dicapai, apa yang masih kurang, dan apa prospek kedepan dari keberadaan fungsi Komite Sekolah/Madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, keberadaan Komite Sekolah/Madrasah disamping benar-benar diperlukan, juga diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien.

2. Kompetensi Sosial

a. Pengertian Kompetensi

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, sehingga dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor dengan sebaik-baiknya.¹²

Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap (daya kalbu), dan ketrampilan (daya fisik) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dengan kata lain kompetensi merupakan perpaduan dari penguasaan pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya.¹³

Menurut peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang guru pada pasal 3, kompetensi guru meliputi; kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.¹⁴

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Citra Umbara, Bandung, 2006, hlm. 4.

¹³ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 23.

¹⁴ Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 & Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Dosen, Citra Umbara, Bandung, 2006, hlm. 22810.

Penguasaan empat kompetensi tersebut mutlak harus dimiliki oleh setiap guru untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional seperti diisyaratkan Undang-Undang Guru dan Dosen.

b. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial guru artinya guru harus menunjukkan atau mampu berinteraksi sosial, baik dengan para siswa maupun dengan sesama guru dan kepala sekolah, bahkan dengan masyarakat luas.¹⁵

Kompetensi sosial guru dapat pula berarti kecakapan dan kemampuan guru dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik interaksi dengan para siswa, sesama guru, orang tua/wali siswa, serta masyarakat sekitar.

Menurut Buchari Alma (2008: 142), kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.¹⁶ Seorang guru harus berusaha mengembangkan komunikasi dengan orang tua peserta didik sehingga terjalin komunikasi dua arah yang berkelanjutan. Dengan adanya komunikasi dua arah, peserta didik dapat dipantau secara lebih baik dan dapat mengembangkan karakternya secara lebih efektif pula.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.¹⁷

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, setiap manusia akan berhubungan dengan banyak orang. Demikian pula seorang guru, ia

¹⁵ Hamzah, B. Uno, *Profesi kependidikan; Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 69.

¹⁶ Agus Wibowo dan Hamrin, *Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun Kompetensi dan Karakter Guru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 124.

¹⁷ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 173.

akan banyak berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, satpam, tukang kebun, orang tua peserta didik dan masyarakat. Semua orang itu penting untuk diperhatikan karena memberikan sumbangsih terhadap proses pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Interaksi sosial yang dapat dilakukan ialah dengan cara berkomunikasi, bekerjasama, bergaul, simpatik, dan mempunyai sikap yang menyenangkan.

Guru adalah makhluk sosial, yang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama kaitannya dengan dunia pendidikan yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah tetapi juga pada pendidikan yang berlangsung di masyarakat.¹⁸

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Bab II tentang Kompetensi dan Sertifikasi, Pasal 3 ayat (6), kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang meliputi kompetensi untuk:

- 1) Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
- 2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
- 3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
- 4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
- 5) Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Untuk menjalin hubungan yang akrab dengan peserta didik seorang guru harus memberikan perhatian kepada masing-masing

¹⁸ *Ibid*, 2008, hlm. 173.

peserta didik. Dia harus memposisikan dirinya sebagai orang tua yang penuh kasih sayang, menjadi fasilitator bagi peserta didik, sebagai tempat mengutarakan perasaan, serta mampu mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat.

Kompetensi sosial menurut Slamet yang dikutip oleh Syaiful Sagala dalam bukunya *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* terdiri dari sub kompetensi yaitu:¹⁹

- 1) Memahami dan menghargai perbedaan serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan.
- 2) Melaksanakan kerjasama secara harmonis.
- 3) Membangun kerja team (team work) yang kompak, cerdas, dinamis, dan lincah.
- 4) Melaksanakan komunikasi secara efektif dan menyenangkan.
- 5) Memiliki kemampuan memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya.
- 6) Memiliki kemampuan menundukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat.
- 7) Melaksanakan prinsip tata kelola yang baik.

Dilihat dari perspektif psikologi, guru harus dapat melihat dengan jelas dan manusiawi bahwa setiap peserta didik adalah manusia yang bermartabat yang harus dihargai sepenuhnya. Dengan cara saling menghargai, dapat dibangun suatu landasan yang mengandung rasa pengertian, saling percaya, saling menghormati, dan mampu menjauhkan dari berburuk sangka dalam mengembangkan kemampuan hubungan sosial peserta didik yang sedang berada pada masa remaja atau perkembangan.²⁰

¹⁹ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 38.

²⁰ Muhammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran*, Wacana Prima, Bandung, 2007, hlm. 123.

c. Telaah Kompetensi Sosial

1. Komunikasi

Salah satu cara untuk mengetahui sejauhmana kompetensi sosial yang dimiliki oleh seorang guru adalah dengan komunikasi, seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Bab II tentang Kompetensi dan Sertifikasi, Pasal 3 ayat (6), kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat dengan yang pertama, Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun.

Kemampuan berkomunikasi akan menentukan keberhasilan individu dan organisasi. Apabila suatu organisasi diisi orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, tujuan organisasi akan cepat tercapai. Demikian pula dengan sebuah organisasi sekolah. Apabila guru-guru, tenaga kependidikan, dan peserta didiknya dapat berkomunikasi dengan santun dan efektif, harapan menjadi sekolah yang berkualitas akan mudah dicapai. Dalam konteks pembelajaran, kemampuan komunikasi yang baik akan menunjang keberhasilan belajar peserta didik.

Komunikasi sebagai suatu istilah dalam pendidikan berarti bahwa pendidik (guru/orang tua) dan anak didik (siswa/anak) tercapai suatu hubungan yang memungkinkan pendidik menyalurkan bahan-bahan pendidikannya (nilai-nilai) kepada anak didiknya.²¹

Komunikasi merupakan proses penyampaian dan pemahaman pesan dari satu orang ke orang lain. Komunikasi digunakan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang atau proses sosial. Komunikasi sangat dibutuhkan manusia untuk berinteraksi sosial. Dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, dan

²¹ Umiarso & Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan "Menjual" Mutu Pendidikan dengan Pendekatan Quality Control bagi Pelaku Lembaga Pendidikan*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2010, hlm. 222.

isyarat. Contoh komunikasi lisan dapat berupa kegiatan berpidato, memberi petunjuk, memberi nasehat dan saling mengobrol. Adapun contoh komunikasi secara tulisan dapat berupa kegiatan surat menyurat. Komunikasi menggunakan isyarat dapat dilakukan dengan memberikan tanda dengan lambaian tangan, gerak mimik, kedipan mata, atau dengan menggunakan alat bantu.

Agar komunikasi berlangsung efektif, perlu dilakukan secara manusiawi, rendah hati, dan diselingi humor. Pertama, komunikasi efektif dilakukan secara manusiawi. Artinya, komunikasi dilakukan secara wajar atau tidak dibuat-buat. Terkadang ada orang yang dalam berkomunikasi meniru-niru gaya artis karena terpengaruh tren. Apabila komunikasi ini terjadi di pedesaan, akan terlihat norak. Dalam berkomunikasi yang baik, ketika memberikan pujian tidak berlebihan tetapi sesuai dengan apresiasi yang mengena.

Kedua, komunikasi akan berlangsung efektif apabila dilakukan dengan penuh kerendahan hati. Sikap rendah hati akan mengundang banyak simpati dari orang lain dibandingkan dengan watak ingin menang sendiri atau ingin menonjol. Seperti pepatah yang mengatakan, *seribu sungai di gunung turun ke laut*. Oleh karena posisi laut berada di tempat yang rendah, sungai-sungai yang ada di gunung akan mengalir ke laut. Ketiga, humor. Seseorang yang memiliki selera humor yang tinggi biasanya mudah diterima di semua kalangan. Namun, perlu kejelian dalam memilih humor. Humor yang tidak tepat justru akan *counter productive*.²²

Menjaga hubungan yang baik dengan teman sejawat, buahnya adalah kebahagiaan.²³ Sebagai pendidik dan anggota masyarakat, guru harus mampu bergaul dan berkomunikasi dengan

²² Barnawi & Mohammad Arifin, *Etika dan Profesi Kependidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 173.

²³ Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru: Dari Pra-Jabatan, Induksi, Ke Profesional Madani*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 229.

baik dengan peserta didik, harus berinteraksi dengan teman sejawat/sesama pendidik, dan orangtua/wali peserta didik, serta masyarakat.²⁴ Menurut Mulyasa (2009: 176), sedikitnya terdapat tujuh kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik di sekolah maupun di masyarakat. Ketujuh kompetensi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.²⁵

1. Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat, baik sosial maupun agama.
2. Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi.
3. Memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi.
4. Memiliki pengetahuan tentang estetika.
5. Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial.
6. Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan.
7. Setia terhadap harkat dan martabat manusia.

Komunikasi antara guru dan peserta didik banyak berlangsung saat proses pembelajaran. Guru harus memahami bahwa karakteristik peserta didik antara yang satu dengan yang lainnya memiliki banyak perbedaan. Perbedaan karakteristik itu terjadi karena perbedaan dalam aspek jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, adat-istiadat, budaya, dan status sosial ekonomi. Guru tidak boleh bertindak diskriminatif karena alasan perbedaan tersebut. Guru harus bersikap objektif dan inklusif terhadap peserta didik. Dengan kata lain, guru harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seutuhnya tanpa membeda-bedakannya.

Selain bersama peserta didik, guru juga akan terlibat interaksi dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Interaksi dapat

²⁴ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hlm. 16.

²⁵ Barnawi & Mohammad Arifin, *Op. Cit*, hlm. 173-174.

terjadi dalam bentuk kerja sama membuat program sekolah, menangani kasus peserta didik, dan melakukan rapat. Sebagai pekerja profesional, guru akan berinovasi, menemukan hal baru atau menemukan tips-tips tertentu dalam pembelajaran. Hasil temuan tersebut harus dikomunikasikan dengan rekan sejawat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Misalnya, guru yang mempunyai gagasan tentang pendidikan maka lebih baik dipublikasikan lewat media. Atau guru berhasil merancang alat peraga yang lebih efektif dibandingkan alat peraga sebelumnya, guru tersebut perlu menyebarluaskan ke guru-guru yang lain agar kualitas pembelajaran di wilayah lain menjadi lebih baik.

Perlu disadari pula bahwa guru harus berkomunikasi dengan orangtua peserta didik dan masyarakat. Dengan orangtua, guru harus berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan tentang kesulitan belajar anak. Program pembelajaran akan lebih baik apabila dibuat bersama-sama orangtua peserta didik. Hal ini bermanfaat demi keefektifan pembelajaran. Orangtua dapat mendukung program di sekolah dan membantu guru dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Mereka harus dapat bekerja sama dan saling menukar pengalaman. Dalam bekerja sama, akan tumbuh semangat dan gairah kerja yang tinggi.²⁶

Selain itu, guru juga harus aktif untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Jangan sampai guru hanya berada di sekolah tidak mau bergaul dengan masyarakat. Apabila seorang guru pindah tugas di tempat yang baru, wajib beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat.

²⁶ Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hlm. 62-63.

Komunikasi dengan masyarakat merupakan upaya kerja sama dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Guru dapat menjalin hubungan dengan masyarakat untuk meminta pertimbangan dan memperoleh dukungan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Masyarakat dapat dimintai pertimbangan, rekomendasi, dan masukan terkait dengan kebijakan sekolah yang meliputi: (1) kebijakan dan program pendidikan; (2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS); (3) kriteria kinerja satuan pendidikan; (4) kriteria tenaga kependidikan; (5) kriteria fasilitas pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan pendidikan. Masyarakat juga dapat dimintai dukungan dalam bentuk tenaga, pemikiran, dan finansial.²⁷

Hubungan dengan masyarakat dapat dilakukan secara formal dan informal. Secara formal dapat melalui komite sekolah dan secara informal dapat melalui pergaulan guru dengan masyarakat sekitar. Dalam bergaul dengan masyarakat, hendaknya guru menjaga kehormatannya dengan tetap menjaga kode etik guru. Jangan sampai karena kesalahan satu guru mengakibatkan citra profesi guru direndahkan oleh masyarakat. Sangat baik sekali apabila guru aktif di masyarakat untuk memberikan segala bentuk hal, seperti pemikiran, tindakan, dan kebendaan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

2. Menggunakan Teknologi Komunikasi Dan Informasi

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah merupakan satu keniscayaan yang harus dilakukan oleh guru. Teknologi merupakan hasil kreasi dan inovasi manusia yang dapat mempermudah proses kehidupan manusia. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dapat memberikan manfaat bagi manusia. Sementara itu, yang dimaksud dengan data ialah suatu objek yang belum diolah (mentah). Teknologi informasi adalah hasil kreasi

²⁷ Barnawi & Mohammad Arifin, *Etika dan Profesi ...*, Op. Cit, hlm. 175.

dan inovasi manusia yang berkaitan dengan proses, penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Teknologi komunikasi merupakan hasil kreasi atau inovasi manusia berkaitan dengan memproses dan mentransfer informasi dari satu orang ke orang lain. Alat yang terancang yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengolah informasi ialah komputer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi ialah teknologi yang memanfaatkan komputer untuk mengolah data menjadi informasi dan menyampaikannya kepada orang lain agar orang tersebut menjadi paham atau mengerti.

Menurut pendapat Robert Taylor, peranan komputer dalam pendidikan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *tutor*, *tool*, *tutee*. Sebagai *tutor*, komputer berperanan sebagai pengajar melalui pendekatan pengajaran berbantuan komputer. Penggunaan komputer sebagai alat pembelajaran dikenal sebagai *Computer Based Education* (CBE). Sebagai *tool*, komputer sebagai alat untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran seperti konteks pengajaran berintegrasi komputer. Komputer juga digunakan untuk pengolahan data proses pembelajaran, seperti pengolahan data nilai siswa, penjadwalan, beasiswa, dan sebagainya. Sebagai *tutee* komputer berperanan sebagai alat yang diajar dan bisa melakukan tanya jawab atau dialog dengan komputer yang biasa disebut dengan *Computer Assist Instruction* (CAI). Saat ini, dengan adanya jaringan global bidang teknologi informasi, komputer juga bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, antardaerah, antarpulau, bahkan antarbenua dengan metode *teleconference* (Aji Supriyanto, 2007: 11).

Komputer memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia. Kelebihan ini dapat digunakan untuk mengatasi

kekurangan yang ada pada diri manusia. Kelebihan yang dimaksud ialah:²⁸

- a. Komputer mampu mengirim data dengan kecepatan tinggi dalam format apa pun antarkomputer dalam jaringan wilayah lokal, regional, maupun global. Saat ini setiap orang dapat mengirim data melalui email ke tempat yang sangat jauh dalam hitungan detik. Bayangkan apabila mengirim data dengan cara diantar langsung pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama;
- b. Komputer tidak mengenal lelah meskipun telah bekerja sehari-hari. Komputer tidak seperti manusia yang merasakan lelah. Memang, kalau komputer digunakan terlalu lama akan terjadi kenaikan suhu pada mesinnya. Suhu yang terlalu tinggi akan merusak komputer. Akan tetapi, komputer memiliki sistem pendingin mesin yang menjaga komputer tetap aman dari kerusakan;
- c. Komputer tidak mengenal kata bosan;
- d. Tingkat kesalahan yang dilakukan komputer sangat kecil;
- e. Sangat teliti. Misalkan, untuk menghitung angka sangat besar atau untuk melihat benda yang sangat kecil.

Meskipun komputer memiliki banyak kelebihan, tetapi ia memiliki satu kekurangan yang sangat fatal. Satu-satunya kekurangan komputer ialah bodoh.

Dalam proses pembelajaran, guru dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sebagai media pembelajaran. Di antaranya komputer dapat digunakan untuk:²⁹

- d. Presentasi. Presentasi sudah lama dilakukan dalam proses pembelajaran, biasanya menggunakan OHP atau Chart. Sekarang zaman sudah semakin maju, presentasi sudah

²⁸ Barnawi & Mohammad Arifin, *Etika dan Profesi ...*, Op. Cit, hlm. 177.

²⁹ Barnawi & Mohammad Arifin, *Etika dan Profesi ...*, Op. Cit, hlm. 177-178.

dilakukan dengan menggunakan komputer atau laptop dan LCD proyektor;

- e. Simulasi. Berguna untuk menggambarkan/mengilustrasikan materi yang sedang dipelajari. Simulasi dapat memperjelas antara teori dan praktik. Program aplikasi yang biasa digunakan ialah *Simulation Game*, *Interactive Study Case*;
- f. *Course management*. Guru dapat menggunakan teknologi informasi untuk melakukan interaksi, kooperasi, dan komunikasi untuk penyelenggaraan sebuah kelas dengan mata ajar tertentu. Dengan bantuan *web*, segala materi, tugas, dan PR dapat diunduh di *web* tertentu;
- g. *Virtual class*. Proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan memanfaatkan beberapa *software* yang dihubungkan melalui internet;
- h. *Computer based training (CBT)*. Konsep ini merupakan konsep yang mendorong peserta didik untuk mandiri. Dengan cara seperti ini, peserta didik dapat mencari sumber mata pelajaran yang ada di internet. Di internet jumlah literatur sangat banyak melebihi jumlah literatur yang ada di perpustakaan;
- i. *Knowlegde portal*. Adalah sekumpulan alamat situs yang memiliki banyak referensi dari berbagai disiplin ilmu. Di sini, baik guru maupun peserta didik, dapat memperluas dan memperdalam pengetahuan yang dimilikinya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema yang sama penting untuk diketahui, karena juga pernah dilakukan para peneliti terdahulu, dengan ini akan menunjukkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Adapun penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa STAIN Kudus lulusan tahun 2008 bernama M. Aly Muzamil dengan judul “Peran Komite Sekolah

Terhadap Peningkatan Daya Dukung Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama di MTs Miftahut Thullab Cengkal Sewu Tahun 2007/2008”. Skripsi tersebut lebih menekankan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan menambahkan mata pelajaran muatan lokal yang dalam penyusunannya berasal dari masyarakat serta mengadakan rapat terbuka. Dalam rapat tersebut tidak hanya membahas penambahan mata pelajaran muatan lokal saja akan tetapi pembahasan tentang perbaikan tata tertib, wali murid koordinasi dengan madrasah dan tentunya kurikulum yang dibahas sesuai dengan KTSP serta berdasarkan pada ajaran Islam Ahlusunnah Waljama’ah. Komite Sekolah berperan sekali terhadap daya dukung masyarakat yaitu dengan kunjungan kerumah tokoh masyarakat/agama, partisipasi kegiatan masyarakat dan kegiatan bersama dengan masyarakat, pertemuan rutin/dialog dengan tokoh masyarakat sekitar serta pihak terkait untuk memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan.³⁰

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa STAIN Kudus lulusan tahun 2008 bernama Edi Sutarno dengan judul “ Pengaruh Komite Madrasah Terhadap Minat Orang Tua dalam Menyekolahkan Anaknya di MA Darus Salam Bermi Gembong Pati Tahun Pelajaran 2008/2009” dalam skripsinya, kepengurusan Komite Sekolah dinilai cukup representative karena adanya pengaruh dari Komite Sekolah terhadap minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah tersebut.³¹

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mahasiswa lulusan STAIN kudus Tahun 2011 yang bernama Lukman Hakim dengan judul “ Kinerja Komite Madrasah dalam Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pesantren (Studi Kasus di MTs Bandar Alim Jungpasir Wedung Demak Tahun Pelajaran 2011/2012)”, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Muatan Lokal

³⁰ M. Aly Muzamil, *Peran Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Daya Dukung Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama di MTs Miftahut Thullab Cengkal Sewu Tahun 2007/2008*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah STAIN Kudus , 2008.

³¹ Edi Sutarno, *Pengaruh Komite Madrasah Terhadap Minat Orang Tua dalam Menyekolahkan Anaknya di MA Darus Salam Bermi Gembong Pati Tahun Pelajaran 2008/2009*, Skripsi, Fakultas Tarbiyan STAIN Kudus, 2008.

adalah mata pelajaran yang digagas oleh satuan pendidikan (madrasah) bersama dengan Komite Sekolah. Mata pelajaran tersebut adalah Ta'limul Muta'allim, Faroidl dan Nahwu Shorof. Karena mata pelajaran muatan lokal yang telah disebutkan diatas merupakan kebutuhan dan ciri khas lingkungan madrasah serta merupakan pengembangan mata pelajaran berdasarkan pada karakteristik pesantren. Komite Sekolah disini berperan sebagai advisory agency (badan pemberi pertimbangan), supporting agency (badan pendukung), controlling agency (badan pengontrol) dan juga sebagai mediator yang sudah terlaksana dengan baik. Tetapi, secara kualitas belum terlaksana dengan optimal, hal ini dikarenakan baru sebatas dataran awal saja. Lukman Hakim dalam penelitiannya menggunakan analisis SWOT yaitu untuk mengetahui: (1) kekuatan: kekuatannya adalah tokoh masyarakat berdomisili di Jungpasir dan sekitarnya, guru dan peserta didik memiliki latar belakang agama yang mapan sehingga kurikulumnya dapat didesain dengan baik. (2) kelemahan: yaitu belum memahami mendalam tentang kurikulum muatan lokal sehingga berdampak pada kinerjanya, peserta didik buta kajian tentang kitab kuning, dan guru belum mumpuni dalam pengadministrasian pembelajaran. (3) peluang: adanya keinginan untuk cukup dalam bekal agama. (4) ancaman: adanya persepsi masyarakat tentang dikotomi ilmu, yaitu lebih mementingkan mata pelajaran umum daripada agama, serta pengaruh teknologi dan informasi yang lebih menurunkan minat belajar ilmu agama.³²

C. Kerangka Berpikir

Dalam dunia pendidikan tentunya sudah tidak asing lagi jika ada yang menyebutkan kata Komite Sekolah/Madrasah. Tetapi banyak yang belum mengetahui keberadaannya, karena itulah di masa sekarang perlu untuk menyadarkan semua golongan yang dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu, mulai dari tingkat menyadarkan perlunya fungsi Komite

³² Lukman Hakim, *Kinerja Komite Madrasah dalam Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Pesantren (Studi Kasus di MTs Bandar Alim Jungpasir Wedung Demak Tahun Pelajaran 2011/ 2012*, Skripsi, Jurusan Tarbiyah STAIN Kudus, 2011.

Sekolah/Madrasah baik kepada masyarakat maupun penyelenggara pendidikan sebagai peluang partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

Komite Sekolah/Madrasah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan. Komite Sekolah/Madrasah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lain.

Komite Sekolah/Madrasah merupakan badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur luar pendidikan sekolah. Yang dalam hal ini Komite Sekolah/Madrasah sangat berperan penting dalam kemajuan pendidikan, salah satunya adalah bagaimana Komite Sekolah/Madrasah dapat memberikan masukan dan arahan dalam proses pengembangan kompetensi sosial guru.

Karena guru juga adalah manusia, dan manusia tentunya adalah makhluk sosial. Yang artinya setiap manusia akan berhubungan dengan banyak orang, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Demikian pula seorang guru, ia akan banyak berinteraksi dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, satpam, tukang kebun, orang tua peserta didik dan masyarakat. Semua orang itu penting untuk diperhatikan karena memberikan sumbangsih terhadap proses pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Interaksi sosial yang dapat dilakukan ialah dengan cara berkomunikasi, bekerjasama, bergaul, simpatik, dan mempunyai sikap yang menyenangkan. Itulah mengapa seorang guru harus memiliki standar kompetensi sosial.

Standar kompetensi sosial guru merupakan kemampuan minimal yang harus dimiliki guru. Standar kompetensi sosial guru mencakup kompetensi inti dimana guru harus memperhatikan sikap dan cara dalam berkomunikasi,

guru harus beradaptasi dengan tempat sesuai dengan kondisi sosial budaya, dan guru harus berkomunikasi dengan komunitas profesi dan profesi lain.

Kerangka berpikir tentang peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Kompetensi Sosial Guru PAI di Madrasah Aliyah NU Raden Umar Sa'id Colo Dawe Kudus dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

